

Nabi Khidir dan Pemecahan Persoalan Bangsa

Sudah genap 10 tahun reformasi untuk mengubah nasib bangsa agar menjadi lebih jujur, adil dan sejahtera berlangsung. Tetapi hasilnya belum dirasakan secara merata. Bahkan, ada sementara pihak sudah berani menyuarakan bahwa reformasi gagal, dalam pengertian belum berhasil mengantarkan masyarakat mendapatkan rasa keadilan, kejujuran dan kesejahteraan. Akhir-akhir ini mulai muncul, suasana batin yang merindukan keadaan seperti semula, sebelum terjadi reformasi. Sebab, dirasakan oleh mereka di masa Orde Baru harga sembako, obat-obatan, minyak dan lain-lain tidak sesulit sekarang. Akibatnya sementara pihak mengatakan bahwa reformasi, justru menjadikan kehidupan ini lebih susah. Presiden Republik Indonesia telah berganti beberapa kali, baik dari teknokrat, kyai, politikus dan juga tentara, tetapi hasil yang diperoleh, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Sejak reformasi, kehidupan masyarakat disusahkan oleh berbagai cobaan, dan siapa pun pemimpinnya tidak akan mampu menghindari. Cobaan itu beraneka ragam, berupa bencana alam, wabah penyakit, konflik dan seterusnya. Terjadi tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan menelan korban meninggal ratusan ribu warga masyarakat, kemudian disusul dengan gempa Nias yang juga memporak-porandakan wilayah itu, disambung dengan gempa bumi Yogyakarta yang menelan tidak sedikit korban. Gempa bumi tidak saja terjadi di tiga tempat, melainkan juga terjadi secara beruntun, mulai di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Irian Jaya. Rasanya musibah gempa ini telah komplis melanda seluruh wilayah Indonesia. Selain itu musibah juga berupa gunung meletus, pesawat jatuh, kapal tenggelam, kereta api keluar dari rel, sampai juga kendaraan roda empat seperti bus dan lain-lain kecelakaan menjadi berita biasa. Musibah lainnya, tanah longsor, puting beliung terjadi di mana-mana, tanpa memilih tempat. Penyakitpun juga merajalela, terjadi di mana-mana, flu burung, cingungunya, DBD, folio dan penyakit lain yang menakutkan terjadi di mana-mana.

Akhir-akhir ini prestasi bangsa, jika hal itu disebut sebagai keberhasilan, adalah berupa semakin penuhnya gedung-gedung penjara di mana-mana. Penghuninya tidak tanggung-tanggung, bukan sebagaimana lazimnya penghuni penjara terdahulu, yaitu para pencuri, pencopet, perampok dan pelanggar aturan kasus kecil-kecilan. Sejak reformasi, penghuni penjara berubah dan berkembang. Para terhukum menjadi lebih bervariasi, ada mantan pejabat sipil, militer, pengusaha, mantan anggota parlemen, baik tingkat daerah maupun pusat, dan bahkan juga mantan menteri. Para mantan pejabat penghuni rumah pesakitan itu, bukan satu dua jumlahnya, tetapi sampai ribuan. Sebagai akibatnya, gedung penjara menjadi sempit, dana yang dibelanjakan harus membengkak dan tidak mencukupi. Oleh karena itu dipandang perlu mengambil langkah kebijakan strategis untuk mengatasinya.

Satu hal yang dirasa aneh, jika mau jujur, sebagian pribadi-pribadi penguasa masa reformasi adalah juga penguasa Orde Baru. Jika penguasa Orde Baru dipandang benar-benar menyengsarakan rakyat, semestinya siapa pun yang terlibat di dalamnya juga seharusnya dikategorikan telah ikut berdosa.

Karena kesalahan Orde Baru bukan kesalahan seorang,---- Pak Harto misalnya, tetapi tidak terkecuali para kroninya, maka mestinya semua harus masuk penjara. Karena itu, jika beberapa pejabat ditangkap lalu diadili, dan dimasukkan ke penjara, maka itu tidak adil. Sebab, kesalahan Orde Baru, lagi-lagi adalah kesalahan sistem, sehingga tepat jika disebut kesalahan kolektif. Kalau demikian halnya, maka yang selayaknya dihukum adalah semua yang terlibat dalam barisan kekuasaan itu. Jika logika di muka yang digunakan, maka rasanya tidak adil menghukum sebagian dan membiarkan lainnya. Sementara ini antara yang dihukum dan yang belum dihukum hanya berbeda tipis, yaitu yang dihukum sudah

ketangkap sedang yang tidak dihukum, hanya karena belum ketangkap. Kedua-duanya telah memproduksi kesalahan yang sama, atau disebut kesalahan jama'ah. Bahkan bisa jadi yang menghukum dan yang dihukum telah melakukan kesalahan yang sama dalam konteks dan volume yang berbeda. Di sinilah orang awam kemudian meraba-raba, bahwa musibah yang terjadi bertubi-tubi itu sesungguhnya bersumber dari ketidakadilan yang luar biasa, yang dirasakan oleh orang-orang terhukum, yaitu anak dan isteri terhukum, keluarga besar terhukum dan kolega serta kenalan yang lebih luas yang bersimpatik, sedangkan mereka tidak mampu berbuat apa-apa.

Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa tidak sedikit hakim dan jaksa kedapatan melakukan kejahatan hingga akhirnya masuk penjara, adalah sebagian dari bukti bahwa sesungguhnya tidak terlalu mudah mencari orang bersih di negeri ini. Yang ada adalah orang yang sudah konangan dan belum konangan, yang semuanya sebenarnya sama-sama telah melakukan kesalahan. Yang konangan sudah dihukum, sedang yang belum masih bisa menghirup udara segar dan bahkan teriak anti KKN. Kasus yang menimpa jaksa yang bertugas menyelesaikan kasus BLBI dan ternyata ----sekalipun belum diputus oleh pengadilan, adalah merupakan petunjuk atas kebenaran sinyalisasi di atas. Kesalahan itu adalah telah dilakukan oleh semua. Sebagai contoh yang mudah dilihat, mulai oleh anak Sekolah Dasar hingga para pensiunan, saat ini untuk menjadi kepala daerah mulai Kepala Desa, Bupati/Wali Kota sampai jabatan Gubernur, selalu menggunakan uang dalam jumlah besar. Fenomena itu menjadikan tidak salah jika kemudian masyarakat menduga dan bertanya, dari mana uang itu diperoleh. Selanjutnya, bagaimana mencari kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk mendapatkan jabatan itu. Jika uang pengembalian itu akan didapat dari kekuasaannya, bukankah hal itu adalah awal terjadinya penyimpangan uang rakyat. Mendapatkan kekuasaan dengan uang dipandang lazim, sehingga tidak terlihat sebagai sesuatu dosa. Jika cara itu ternyata kemudian hari dianggap salah maka bisa jadi, pada gilirannya penguasa tersebut akan dituntut dan diminta pertanggung jawaban dan akhirnya juga dimasukkan penjara.

Perlu dibedakan Nakal, Salah dan Terkena Musibah

Dua istilah berbeda, yakni nakal dan salah tampaknya belum dirasakan sebagai sesuatu yang berlainan. Keduanya dianggap sama, terutama jika dilihat dari konsekuensi terhadap masing-masing pelakunya. Jika seorang dianggap nakal, jahat, dholim dengan bukti cukup, setelah melewati sebuah proses yang dianggap legal, maka yang bersangkutan lantas dihukum. Pandangan ini adalah benar. Sebab, tidak boleh dalam kehidupan bermasyarakat ada orang yang terganggu apalagi celaka yang disebabkan oleh kenakalan, kejahatan atau kedholiman. Mestinya hal itu dibedakan dari mereka yang melakukan kesalahan atau kekeliruan, apakah kesalahan karena kelalaian atau karena yang bersangkutan memang tidak tahu bahwa perbuatannya adalah salah. Mereka yang melakukan kesalahan semestinya tidak dihukum. Hukuman mestinya hanya diberikan kepada siapa saja yang nakal, sedangkan mereka yang melakukan kesalahan, seharusnya mereka lebih tepat segera dibenarkan.

Kedua konsep itu sesungguhnya berbeda, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, antara orang nakal dan orang salah, dianggap sama. Mereka yang nakal dan yang berbuat salah, sama-sama dihukum, sehingga tampak tidak ada bedanya antara keduanya. Memang kadang kala tipis sekali beda keduanya. Masing-masing, sama-sama merugikan dan bahkan menyengsarakan dirinya dan juga orang lain. Orang nakal selalu membuat kesalahan, akan tetapi orang yang melakukan kesalahan, belum tentu dilakukan oleh orang yang nakal. Kehidupan ini tidak pernah bisa dilihat dalam perspektif tunggal. Kehidupan

selalu berwajah kompleks dan beraneka ragam. Hal itu tidak saja tampak dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Kompleksitas dan multi perspektif itulah menjadikan seseorang disebut melakukan kekeliruan pada satu sisi, tetapi bisa jadi justru dipandang benar tatkala dilihat dari sisi lainnya. Kita ingat, kisah Nabi Khidir dalam al-Qur'an. Nabi Khidir selalu melakukan hal yang salah menurut perspektif Musa. Seorang anak, tanpa dilihat berbuat salah, dibunuh. Membunuh dalam perspektif Musa adalah salah, tetapi dalam perspektif Nabi Khidir, justru itulah yang harus dilakukan. Musa menjadi paham, setelah mendapat penjelasan oleh Nabi Khidir. Jika atas perbuatan itu Nabi Khidir dihukum, maka justru akan terjadi malapetaka di kemudian hari. Musa pun kemudian paham dan justru membenarkan apa yang dilakukan Nabi Khidir.

Kisah kedua Nabi ini, yakni Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah sangat penting dijadikan pelajaran terkait untuk penyelesaian kasus-kasus yang tidak kita sukai bersama di tanah air ini, ialah korupsi, nepotisme dan kolusi. Seringkali kita terganggu oleh rasa keadilan, tatkala seseorang yang sehari-hari dipandang baik, dan bukan seorang yang tepat dimasukkan dalam kategori nakal, jahat atau dholim, ternyata setelah melalui proses hukum, mereka dinyatakan salah dan dimasukkan ke penjara. Anehnya, sampai keluar dari penjara pun, mereka tidak merasa menjadi orang durhaka, jahat dan dholim kepada negara dan bangsa. Mereka hanya merasa salah dalam mengambil keputusan, baik karena tidak tahu atau dianggap telah menjadi tradisi yang dilakukan seperti itu dari periode ke periode berikutnya. Apalagi, sesungguhnya, konsep salah pun tidak tepat kalau ditakar dalam ukuran waktu yang berbeda.

Kasus-kasus dalam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa yang dikisahkan dalam al-Qur'an, yang karena itu dijamin kebenarannya, memberikan petunjuk bahwa dalam melihat sesuatu yang dianggap salah dan merugikan orang, seharusnya tidak saja dilihat dalam satu perspektif pendek dan sederhana, melainkan harus dilihat dalam konteks luas dan masa yang panjang. Nabi Khidir saja yang membunuh orang, setelah dikonfirmasi dipandang benar, apalagi sebatas mengeluarkan dana taktis dan DAU. Pandangan serupa tentunya juga ketika melihat kasus-kasus pejabat tinggi lainnya yang dianggap salah dan dimasukkan ke penjara.

Para pejabat yang dituntut dan dimasukkan ke penjara itu dinyatakan salah, memang benar. Tapi pertanyaannya adalah apakah seseorang yang salah, apalagi kesalahan itu terkait dengan sistem yang dijalankan ketika itu harus menjalani hukuman. Bukankah, antar periode, masa dan bahkan rezim terjadi suasana dan ukuran yang berbeda. Bagaimana suasana, ukuran dan standar nilai berbeda digunakan untuk mengadili seseorang secara sama. Tentu di sini, rasa keadilan masyarakat menjadi terganggu. Hukuman mestinya diberikan dalam konteks untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Jika yang dimaksud masyarakat keseluruhan itu adalah termasuk orang yang nakal, jahat atau dzalim, maka hukuman yang dijatuhkan itu dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang dihukum itu. Tegasnya, tujuan akhir hukuman adalah agar individu dan masyarakat secara keseluruhan menjadi baik, bukan dimaksudkan agar terhukum menjadi sengsara. Hukum dijalankan adalah agar terjadi proses perbaikan semua orang. Melalui proses hukuman itu masyarakat diharapkan menjadi baik, aman dan sejahtera secara keseluruhan. Jika dengan hukuman itu hanya sebatas mengantarkan pihak-pihak yang dihukum menjadi menderita, dan masyarakat puas dengan penderitaan itu, maka artinya masyarakat belum dewasa. Disebut sebagai masyarakat yang sehat, manakala para anggotanya berpikiran dan berhati nurani sehat. Pertanda orang sehat, manakala melihat orang lain sengsara ikut susah dan begitu pula sebaliknya.

Perlu Melihat Jauh Ke Depan

Beban bangsa ini semakin hari terasa semakin berat. Kemiskinan bertambah, pengangguran terjadi di mana-mana, mencari lapangan pekerjaan sedemikian sulit. Alternatif yang ditempuh, mencari di mana saja, asalkan pekerjaan itu bisa mempertahankan hidup. Maka, setiap hari anak-anak negeri yang tanahnya luas dan subur ini terpaksa hijrah menjadi apa saja, tukang bersih, pembantu rumah tangga, sopir dan sejenisnya di negeri orang. Mereka dikenal sebagai TKI atau TKW. Nasibnya tentu, tidak membahagiakan apalagi membanggakan. Akan tetapi, apalagi jika pilihan lainnya yang lebih bermartabat sudah tidak tersedia.

Persoalan lain, pendidikan juga selalu diteriakkan di mana-mana sepanjang waktu. Baik persoalan itu menyangkut dana terbatas, guru yang kurang sejahtera, gedung sekolah ambruk, bahkan produk pendidikan yang kurang match dengan kebutuhan lapangan kerja di masyarakat. Yang terjadi kemudian adalah lulusan sekolah ketrampilan yang menganggur, apalagi dari sekolah umum seperti SMU. Tidak itu saja, kesulitan mencari kerja juga dialami oleh kelompok lulusan perguruan tinggi, atau sarjana. Muncul istilah sarjana pengangguran di mana-mana, sementara perguruan tinggi juga masih mengedepankan jumlah atau kuantitas mahasiswanya, sekalipun lulusannya masih banyak yang sulit cari kerja. Kampus ditutup juga tidak mungkin, sebab juga akan melahirkan persoalan baru. Mestinya alternatif yang dilakukan adalah bagaimana mencari upaya-upaya peningkatan kualitas sekaligus relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Persoalan lainnya, pemerintah juga masih dihadapkan oleh budget yang terbatas, sedangkan di pihak lain infrastruktur seperti sarana jalan, jembatan, alat transportasi sampai peralatan militer, semua menuntut dilakukan pembenahan dan pembaharuan kembali. Belum lagi, kasus-kasus lain seperti kenakalan, narkoba, perdagangan orang, penyelundupan dan kejahatan lainnya masih perlu energi lebih untuk mengatasinya.

Oleh karena itu, jika strategi menyelesaikan persoalan bangsa ini kurang tepat, terlalu banyak melihat ke belakang, maka suatu saat akan terjadi kontra produktif. Jika kebijakan mengusut para pejabat masa Orde Baru, yang dianggap biang keladi terjadinya krisis, sebetulnya tidak adil jika hanya ditujukan kepada pejabat dan mantan petinggi yang sudah lama meletakkan jabatannya. Jika hal itu diniatkan untuk menggali tambahan anggaran yang diperoleh dari pengembalian harta yang diselewengkan, maka sudah waktunya dikalkulasi, berapa sesungguhnya keuntungan negara yang diperoleh dari hasil pengusutan orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Jika motifnya bukan itu, melainkan agar terjadi suasana jera dari para pejabat sekarang, mengapa hal itu ditempuh dengan mensengsarakan sebagian orang yang sama-sama telah melakukan kesalahan serupa. Tentunya tidak adil, jika kebijakan pemberantasan korupsi ini sekedar dimaksudkan agar kita disebut telah memberantas KKN secara serius. Pertanyaan lainnya adalah untuk apa kebijakan itu jika justru melahirkan rasa ketidakadilan yang lebih mendalam lagi. Lebih-lebih dengan kebijakan yang tidak efektif itu ternyata juga membawa korban berikutnya, yaitu berapa banyak isteri, anak, cucu, keluarga kecil dan keluarga besar mereka menjadi menderita, malu dan frustrasi. Bukankah hal ini semua justru berlawanan dengan upaya menjadikan rakyat keseluruhan menjadi tentram dan damai. Tidakkah sebaiknya kita gunakan seluruh energi untuk menatap persoalan bangsa yang lebih mendesak, strategis dan lebih menguntungkan kita semua di masa depan. Persoalan yang harus segera diselesaikan itu misalnya penanggulangan kekurangan makanan, pendidikan, tenaga kerja dan lain-lain, dari berpikir bagaimana agar penjara semakin penuh. Akibatnya tidak saja orang jahat, nakal dan dholim yang dimasukkan ke sana, melainkan orang-orang

yang salah karena tidak disengaja atau sistem yang berlaku ketika itu. Secara pribadi saya sangat membenci KKN, para pelakunya, saya juga menyebutnya juga sebagai orang jahat. Tapi saya berpikir, bukankah itu semua telah dilakukan oleh hampir semua orang, sedangkan yang membedakannya hanyalah sebatas kadar kejahatannya saja. Atas dasar pandangan itulah, maka saya mengajak untuk lebih arif dalam menyembuhkan bangsa ini ke depan. Bukankah dalam melihat sesuatu, apa yang diajarkan oleh nabi Khidir seharusnya perlu kita renungkan dalam-dalam, wallahu a'lam.